

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rashid,Harun, 1986, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah* (Berikut Peraturan Peraturannya),Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Chulaimi,Achmad, 1986, *Hukum Agraria Perkembangan Macam Macam Hak Atas Tanah Dan Pemindahan*, Semarang, F.H Undip.
- Parlindungan,A.P., 1990, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni.
- Parlindungan,A.P., 1991, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata cara PPAT*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Parlindungan,A.P., 1998, *Komentar Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Raharjo,Agung, 2010, *Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris*, Penelitian Tesis, Semarang, UNDIP.
- Roestandi,Ardiwilaga R., 1962, *Hukum Agraria Indonesia* , Bandung, NV. Masa Baru.
- Bermawi,Arnis , 2002, *Pengantar Hukum Agraria* , , Jakarta, Universitas Borobudur.
- Bidara,D. dan Bidara,Martin P., 1984, *Ketentuan Perundang-undangan Yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI tetang Hukum Acara Perdata* , Jakarta, Pradnya Paramit.
- Dirman, 1958, *Perundang-undang Agraria di Seluruh Indonesia* , Jakarta, J.B. Wolters.
- Faisal,Sanapiah, 1995, *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Friedman,Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc.
- Hadjon,Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri,Koesnadi, 1986, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press.

- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Hardiningsih, 2006, *Analisis Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Rangka Pendaftaran Konversi Bekas Hak Milik Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 36 No 4 bulan Oktober-Desember.
- Kuswanto, Heru, 2005, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Narotama.
- Hj. Buang, Hj. Saleh, 2001, *Malaysian Torrens System*, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Imam, 1981, *Hak Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty.
- J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Bandung, PT Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Bina Cipta
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH Universitas Islam Indonesia Press.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, PT. Alumni.
- Matthew Stephens, 2009, *The Commission on Legal Empowerment of the Poor: An Opportunity Missed*, Hague Journal on the Rule of Law.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja, Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mudjiono, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 Juli.
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim, Ridwan, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Perangin, Effendi, 1986, *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Rahmi,Elita, 2012, *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah dan Realitas Pembangunan di Indonesia*. Jurnal Hukum No 11 Vol 10S2012 bulan Januari
- Rahardjo,Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Ramli,Zein, 1995 *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta , Rineka Cipta,.
- Ruchiyat,Eddy, 1984, *Politik Nasional Sampai Orde Baru* , Bandung, Alumi.
- Rasjidi,Lili, 1992, *Filsafat Dasar-dasar Hukum*, Bandung, Alumni.
- R. Soeprapto, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek* , Jakarta, C.V. Mitra Sari.
- Saleh, K. Wantjik, 1977, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Simamora,Yohanes Sogar, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya.
- Sumardjono,Maria S.W., 2008, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta , Kompas.
- Sumardjono,Maria S.W.,2001, *Kebijakan Tanah : Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Kompas.
- Sudiyat,Eddy Rukhiy, 1981, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung, Alumni.
- Soekanto,Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perseda.
- Sutedi,Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta , Sinar Grafika Offset.
- Wignjosoebroto,Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Abimanyu,Timur, 2012 *Kepastian Hukum Atas Sertifikat Tanah sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah, Studi Kasus Atas Sengketa Tanah Meruya Selatan*, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 29 / 05 / 2012.
- Daryono, 2010, *Transformation of Land Rights in Indonesia: A Mixed Private And Public Law Model*, Pacific Rim Law & Policy Journal

- Damah, 2008, *Fungsi Kutipan Letter C Desa dalam Hal Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk Pertama Kali*, Postgraduate Airlangga University, <http://adln.lib.unair.ac.i>, diakses pada 29/05/2012
- Wright, Glen, *Indigenous People And Customary Land Ownership Under Domestic Redd+ Frameworks: A Case Of Indonesia*, *Law, Environment and Development Journal* Vol 7/2. www.lead-journal.org. Diakses pada tanggal 28/05/2012.
- Jamal, Fitriani. 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia,. E-Book: www.docstoc.com/docs/20666054/pengantar-hukum-indonesia,
- A.Z, Yahya. *Keadilan dan kepastian hukum*, [http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan -dan- kepastian-hukum.html](http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html)., diakses tanggal 7 Mei 2010.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.